

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan menghasilkan salah satu produk sampingan (*side product*) berupa limbah. Limbah padat dalam bentuk sampah apabila tidak terkelola dengan baik akan langsung menimbulkan dampak negatif bagi berbagai objek terutama lingkungan, kesehatan, estetika, sosial dan ekonomi. Jumlah sampah berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk, semakin meningkat jumlah penduduk pada suatu wilayah maka jumlah sampah dan timbulan sampah yang terdapat pada wilayah tersebut otomatis juga akan bertambah. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, beragamnya jenis, dan karakteristik sampah dan limbah (Damanhuri, Handoko dan Padmi, 2014).

Kondisi terakhir dari persampahan global saat ini semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah penduduk dunia sekitar 7,53 miliar orang, bumi dapat menghasilkan sampah sebanyak 2,01 miliar ton pertahun, sebanyak 33% nya tidak dikelola dengan cara yang aman bagi lingkungan. Sampah dunia tersebut juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 70% pada tahun 2050 atau sebanyak 3,4 miliar ton karena didorong oleh faktor urbanisasi yang cepat, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi (Kaza *et al.*, 2018). Lebih lanjut data Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa secara regional, kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan penyumbang sampah terbesar yaitu sebanyak 468 juta ton pertahun atau sebesar 23% dari total sampah dunia. Sebanyak 90 % sampah yang ada di laut merupakan sampah plastik. Kerugian finansial ekosistem laut secara global dari sampah plastik sangat besar yaitu sekitar US \$ 13 miliar per tahun. Hanya 5 persen dari sampah plastik didaur ulang dengan efektif dan 40 persen berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, serta sisanya berakhir di ekosistem seperti lautan. Pengelolaan sampah

jika tidak mulai dilakukan segera maka diprediksi tahun 2050 di lautan akan lebih banyak jumlah limbah plastik daripada ikan yang hidup di dalamnya (Kaza *et al.*, 2018). Indonesia menjadi negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik di dunia setelah China (Jambeck *et al.*, 2015). Jumlah timbunan sampah nasional sudah mencapai 65,2 juta ton pertahun.

Pengelolaan persampahaan oleh pemerintah baik dari segi aturan legal, perencanaan dan teknis operasional tergolong lengkap melalui sederet dokumen teknis dan peraturan yang telah dikeluarkan. Diantaranya yaitu rencana penetapan “cukai plastik”. Pajak ini dikenal dengan nama *sin tax* dan digunakan untuk meminimalisir pemakaian barang atau produk tertentu yang dianggap berlebihan atau berdampak buruk bagi banyak orang. Dikenakannya pajak ini terhadap produk plastik agar jumlah sampah plastik di masyarakat dapat dikurangi sehingga membantu usaha pelestarian lingkungan. Upaya ini cocok diterapkan terhadap produk plastik karena besaran pajak tersebut dapat disesuaikan dengan sifat barangnya. Misalnya dalam hal lama penguraian, semakin lama waktu penguraian sebuah produk plastik maka tarif pajak atau cukainya dapat lebih ditinggikan. Pajak ini juga dapat mengatur penyebaran fisik produk plastik (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Data statistik masih menunjukkan bahwa pengelolaan persampahaan nasional belum optimal. Angka ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia tergolong tinggi. *Share* terbesar terhadap perilaku tidak peduli lingkungan berasal dari pengelolaan sampah yaitu sebesar 35,53%. Lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia (66,8%) menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan ketika melakukan pengelolaan terhadap sampah, seperti membakar sampah yang akan menimbulkan polusi udara ataupun membuang sampah ke sungai, selokan dan sembarangan tempat (Badan Pusat Statistik, 2018).

Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang populasinya di Indonesia tidak terlalu berbeda jauh dengan pria justru kurang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan. Ketimpangan terhadap perempuan masih terjadi dalam berbagai sektor. Data WEF (*World Economic Forum*) menunjukkan bahwa Indonesia menempati rangking ke-85 dari 149 negara dalam hal kesetaraan gender yang meliputi indikator partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, tingkat kesehatan dan pemberdayaan politik dengan skor 0,691 dari nilai maksimal 1 (World-Bank, 2018).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa, perempuan selalu diberi upah lebih rendah dari laki-laki. Rata-rata upah perempuan adalah sebesar Rp 1,6 juta, atau 13% lebih rendah dari upah laki-laki yang sebesar Rp 1,9 juta pada tahun 2015 (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Perempuan masih banyak menggeluti pekerjaan tanpa bayaran yang setimpal, antara lain yaitu

pemberian perawatan khusus untuk anak-anak, lansia, ataupun perawat kesehatan. Bahkan ada pekerjaan yang sama sekali tak berbayar, seperti pekerjaan domestik menyiapkan makanan, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Data MenCare menunjukkan perempuan bekerja rata-rata tiga kali lebih banyak daripada laki-laki ketika menggeluti bidang pekerjaan tak berbayar tersebut (Heilman *et al.*, 2017).

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender juga telah diamanatkan sebagai salah satu target global nomor 5 dalam SDG's yang berbunyi: "*Achieve gender equality and empower all women and girls*" (United Nations, 2015). Tujuan SDG's tersebut ditindaklanjuti melalui adaptasi regulasi oleh negara anggota PBB termasuk Indonesia.

Pengelolaan sampah paling mutakhir dengan teknologi tinggi dan membutuhkan biaya besar telah banyak dilakukan oleh negara-negara maju, namun untuk negara berkembang dengan segala keterbatasannya baik dari segi sumber daya manusia maupun kemampuan pembiayaan maka sistem daur ulang sederhana melalui Bank Sampah merupakan salah satu solusi terbaik saat ini. Bank Sampah menghimpun partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah pribadi mereka terutama skala rumah tangga atau lingkungan permukiman. Pada Bank Sampah masyarakat menabungkan sampah anorganik hingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya setelah dijual secara langsung ataupun diolah dahulu wujudnya menjadi produk-produk 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (Wijayanti dan Suryani, 2015). Bank sampah menjadi contoh implementasi model ekonomi sirkular yang cukup efektif terutama dinegara berkembang.

Meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi, membuat ibu rumah tangga harus berpikir keras mengatur masalah keuangan, bahkan memikirkan bagaimana caranya untuk menambah penghasilan keluarga selain dari suami mereka (Sumiarti, 2008). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan peningkatan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Ibu rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang paling berpeluang besar untuk berperan aktif dalam program Bank Sampah karena didukung oleh ketersediaan sumber daya fisik maupun waktu yang mereka miliki (Ikhwanul, Kawung and Waani, 2014; Gayatri, Hapsari and Aqil, 2018).

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di akhir tahun 2017 menyatakan bahwa telah ada 5.244 Bank Sampah di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,48 miliar. Sebanyak 163.128 orang diperkerjakan di seluruh Bank Sampah tersebut, dan 49 % diantaranya adalah wanita yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Semua Bank Sampah tersebut juga sangat berperan secara signifikan dalam mengurangi sampah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,7%. Oleh karena itu

maka diketahui bahwa keberadaan Bank Sampah dapat memberikan dampak positif yaitu berupa kontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sekaligus peluang pekerjaan untuk memberikan penghasilan tambahan. Pada beberapa wilayah telah terdapat berbagai cerita sukses mengenai bank sampah terutama di daerah perkotaan, salah satunya yaitu bank sampah induk di DKI Jakarta mampu meraih keuntungan sebesar 4,95 miliar rupiah dalam satu tahun. Hambaran pembuangan akhir yang sempit dan terbatas, menjadikan program daur ulang terutama melalui gerakan bank sampah menjadi salah satu solusi permasalahan penumpukan sampah perkotaan (Wulandari, Hadi Utomo and Narmaditya, 2017).

Program bank sampah difasilitasi oleh berbagai pihak, ada yang swadaya masyarakat, lembaga atau perusahaan swasta maupun pemerintah serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitarnya. Di dalam bank sampah, anggota atau nasabah tidak diarahkan untuk menabungkan sampah anorganiknya saja, tetapi juga diberi berbagai pembekalan mengenai berbagai hal tentang cara pengelolaan sampah baik anorganik maupun organik, proses pengolahannya, pembuatan produk 3R, hingga pemasarannya. Edukasi tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup serta berbagai motivasi juga diajarkan melalui berbagai macam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

Padang Panjang merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat dengan kekhasan tersendiri. “Terhukum” oleh luas wilayah yang kecil, curah hujan tinggi, iklim cenderung dingin dan topografi wilayah yang tidak rata, cenderung berbukit dan berlembah, menjadikan usaha mengelola Padang Panjang menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pemerintahan daerahnya. Kebersihan kota atau pengelolaan persampahan adalah salah satu dimensi penting dari isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian khusus bagi seluruh level pemerintahan mulai dari pusat hingga Kota dan Kabupaten di daerah termasuk Kota Padang Panjang. Pengelolaan sampah padat perkotaan dan permukiman di Padang Panjang masih menggunakan sistem manual tradisional (*Human Base*), dimana semua pekerjaan mulai dari penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan tenaga petugas kebersihan hingga sampai ke TPSA (Tempat Penampungan Sampah Akhir).

TPSA Kota Padang Panjang (TPSA Sungai Andok) yang berdasarkan dokumen kajian teknis telah akan berakhir masa operasionalnya pada penghujung tahun 2019, sedangkan menurut penelitian Delfianto (2006) batas usia atau daya dukung dan daya tampung TPA Sungai Andok justru telah berakhir pada tahun 2016 namun hingga saat ini belum ada solusi atau alternatif lokasi TPA baru yang ditetapkan secara resmi oleh Pemko Padang Panjang (Delfianto dan Pandebesie, 2006).

Anggaran pengelolaan persampahan Pemerintah Kota Padang Panjang termasuk salah satu yang “tergendut” di Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan proporsi beban luas wilayah dan jumlah penduduknya. Sementara itu kecenderungan pertambahan jumlah penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahun yang secara empiris akan otomatis meningkatkan jumlah konsumsi, jumlah timbunan sampah dan beban pencemaran yang harus segera dicarikan solusi alternatif penanganannya sebelum akhirnya dibuang ke TPA.

Bangunan permanen Bank Sampah yang telah didirikan oleh Pemko Padang Panjang berjumlah empat buah dan tersebar di 2 Kecamatan sejak tahun 2014 dan 3 (tiga) bangunan dari swadaya masyarakat, namun jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan skala kota nyaris hampir sama setiap tahunnya dengan jumlah sampah akhir yang dibuang ke TPA walaupun ada reduksi jumlahnya tidak signifikan dan hanya terjadi akibat peran pengepul bukan Bank Sampah.

Data terakhir dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa peran Bank Sampah sebagai pusat pengolahan sampah dan edukasi masyarakat melalui cara daur ulang atau 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) belum optimal. Jumlah sampah yang terserap oleh Bank Sampah makin lama makin menurun hingga hanya sekitar 0,04 % dari total timbunan sampah kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum termotivasi dan tersosialisasikan secara menyeluruh mengenai besarnya potensi ekonomi yang dimiliki jika seseorang menjadi nasabah Bank Sampah.

Tabel 1. Data Timbunan Sampah Kota Padang Panjang

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (jiwa)	51712	52422	52935	56562	57767
PDRB perkapita (Rp)	1.839.183	1.951.003	2.066.248	2.186.152	2.313.117
Timbunan sampah kota (Ton/Hari)	38,94	39,78	43,65	46,65	47,44
Timbunan sampah kota yang masuk ke TPA (Ton/ Hari)	31,58	32,24	35,92	38,17	40,72
Timbunan sampah yang di serap Bank Sampah (Ton/Hari)	0,157	0,062	0,038	0,053	0,047
Timbunan sampah domestik/rumah tangga (Ton/ Hari)	16,32	18,83	25,51	26,13	26,74

Sumber: Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk, PDRB perkapita dan timbunan sampah kota akan cenderung meningkat setiap tahunnya, namun penyerapan sampah oleh bank sampah selama lima tahun tersebut cenderung stagnan dan hanya berkisar pada angka 0,04% perhari.

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menjalankan program pembinaan terhadap bank sampah secara simultan mulai dari tahun 2014. Berbagai kegiatan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pengayaan pengetahuan telah dilakukan dan diberikan kepada masyarakat secara umum dan kepada anggota, pengurus serta nasabah bank sampah secara khusus. Akan tetapi hasil penyerapan sampah oleh bank sampah tersebut masih jauh lebih kecil dari hasil yang diharapkan.

Unsur masyarakat yang berpeluang besar untuk dapat didorong partisipasi aktifnya tersebut adalah kelompok Ibu Rumah Tangga. Data statistik Kota Padang Panjang menampilkan bahwa “mengurus rumah tangga” merupakan status non angkatan kerja yang signifikan yaitu 15,24 % dari total jumlah penduduk atau sebesar 56400 jiwa dan sebanyak 5565 jiwa merupakan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2018). Angka ini menunjukkan potensi yang besar perempuan pengurus rumah tangga untuk dilibatkan partisipasi aktifnya dalam gerakan pengelolaan sampah domestik melalui Bank Sampah, hanya saja belum terberdayakan secara menyeluruh dan optimal.

Keterbatasan sarana pengolahan akhir sampah terutama sampah anorganik serta adanya potensi ekonomi dalam hasil pendaurulangan menjadikan pola penanganan sampah padat perkotaan tidak lagi berorientasi pada pengurangan kuantitas lewat pembuangan pada TPA, namun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan daur ulang melalui kelembagaan Bank Sampah. Melalui penelitian ini maka akan diketahui seberapa besar peran bank sampah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya ibu rumah tangga, sehingga bisa menjadi salah satu acuan atau rujukan motivasi bagi masyarakat atau calon nasabah untuk memiliki keinginan berkegiatan dan berperan aktif di bank sampah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana karakteristik nasabah Bank Sampah Kurabu yang berstatus Ibu Rumah Tangga?
2. Bagaimana edukasi tentang pengetahuan pemanfaatan sumber daya, penumbuhan sikap peduli lingkungan, pelatihan keterampilan, penumbuhan jiwa kewirausahaan dan motivasi

kemandirian pada Bank Sampah dapat mempengaruhi peningkatan pemberdayaan ibu rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis karakteristik nasabah bank sampah Kurabu yang berstatus Ibu Rumah Tangga.
2. Menganalisis pengaruh kegiatan Bank Sampah (edukasi tentang pengetahuan pemanfaatan sumber daya, penumbuhan sikap peduli lingkungan, pelatihan keterampilan, penumbuhan jiwa kewirausahaan dan motivasi kemandirian) terhadap peningkatan pemberdayaan ibu rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan metode yang terkait dengan peran Bank Sampah dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Serta sebagai bahan atau referensi bagi para peneliti lain yang ingin mengembangkan keilmuan terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dan diadopsi oleh pemerintah untuk melakukan kajian sekaligus pengambilan kebijakan dalam manajemen pengelolaan persampahan agar tidak menjadi beban utama pencemaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa batasan. Batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh Bank Sampah Kurabu terhadap peningkatan pemberdayaan Ibu Rumah Tangga yang menjadi nasabahnya;
2. Penelitian difokuskan pada jumlah sampah anorganik jenis plastik dan kertas yang dikelola Bank Sampah dari nasabah baik dalam bentuk utuh maupun yang telah dirubah menjadi produk 3R.

3. Penelitian dilaksanakan terhadap data hasil survey pada nasabah Bank Sampah Kurabu di Kota Padang Panjang khusus bagi yang berstatus Ibu Rumah Tangga.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran Struktur dan sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini merupakan landasan teori penelitian berupa penyulingan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, berita elektronik dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Landasan teori ini digunakan untuk mengetahui *gap* antara fenomena yang telah dikemukakan dalam BAB I dan teori yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan untuk mengolah data yang telah dihimpun pada penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, knik pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi data, tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menggambarkan analisis atas *gap* yang terdapat antara fenomena yang ada dengan teori yang dipakai. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data dan juga berisi rekomendasi atau saran bagi pemerintah sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan.